

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh penerapan *good governance* dan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan *good governance* diukur menggunakan indeks tata kelola pemerintahan. Sementara hasil pemeriksaan BPK RI terbagi menjadi tiga kategori yaitu opini audit, hasil evaluasi SPI, dan temuan audit. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang berasal dari penilaian badan kemitraan Indonesia Government Index terhadap penerapan tata kelola pemerintahan pada masing-masing daerah, dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas dalam penelitian ini (tata kelola pemerintahan, opini audit, hasil evaluasi SPI, dan temuan audit) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Indeks tata kelola pemerintahan dan opini audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebaliknya variabel temuan audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara hasil evaluasi SPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK RI, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.